

Membangun kesadaran kewarganegaraan di era digital: tantangan dan strategi menuju partisipasi demokratis

Mochammad imdad royhani

program studi perbankan syariah, universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang

E-mail: *imdadd43@gmail.com

Kata Kunci:

kewarganegaraan digital, partisipasi demokratis, literasi media, era digital, pendidikan kewarganegaraan.

Keywords:

digital citizenship, democratic participation, media literacy, digital age, citizenship education.

abstrak

Era digital telah mengubah lanskap kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal partisipasi kewarganegaraan. Perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus tantangan dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Artikel ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan di tengah arus informasi digital yang masif, seperti disinformasi, polarisasi opini, dan rendahnya literasi digital. Selain itu, artikel ini juga menguraikan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi demokratis, antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis digital, penguatan literasi media, dan optimalisasi ruang publik virtual yang inklusif. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis literatur, tulisan ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap upaya kolektif membangun warga negara yang melek digital, kritis, serta berperan aktif dalam kehidupan demokratis di era informasi.

Abstract

The digital era has transformed the landscape of civic life, particularly in terms of citizen participation. The advancement of information technology presents both opportunities and challenges in fostering a critical, active, and responsible sense of citizenship. This paper explores the various obstacles in raising civic awareness amidst the massive flow of digital information, such as disinformation, opinion polarization, and low digital literacy. Furthermore, it outlines strategic approaches to promote democratic participation, including digital-based civic education, the strengthening of media literacy, and the optimization of inclusive virtual public spaces. Using a qualitative approach and literature analysis, this study aims to contribute to the collective effort in developing digitally literate, critical, and democratically engaged citizens in the information age.

Pendahuluan

Kesadaran akan pentingnya peran sebagai warga negara merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewarganegaraan bukanlah sekadar status administratif, tetapi mencerminkan keterlibatan individu secara aktif dan bertanggung jawab dalam membangun tatanan sosial dan politik suatu negara. Dalam konteks perkembangan zaman yang kini didominasi oleh kemajuan teknologi digital, penyebaran informasi terjadi secara masif dan berlangsung dalam hitungan detik. Kondisi ini mengubah secara drastis cara pandang, pola perilaku, dan cara warga negara berinteraksi dalam proses demokratisasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai peluang baru bagi keterlibatan warga dalam diskusi publik, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, hingga partisipasi dalam pemilu dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

gerakan sosial. Namun, kemudahan ini juga membawa konsekuensi yang tidak ringan. Masyarakat, khususnya generasi muda, kini dihadapkan pada tantangan serius seperti penyebaran informasi palsu (disinformasi), menguatnya polarisasi opini yang memecah belah masyarakat, serta rendahnya tingkat literasi digital yang menyebabkan kesulitan dalam memilah informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat, diperlukan redefinisi terhadap makna dan peran warga negara Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa dituntut untuk tidak hanya memahami nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mewujudkannya dalam bentuk tindakan nyata. Kesadaran kewarganegaraan masa kini harus mencakup kemampuan berpikir kritis, berperilaku etis, serta mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam setiap ruang interaksi digital, baik di media sosial, forum online, maupun platform komunikasi lainnya. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di era digital ini menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikembangkan guna membentuk generasi yang sadar, tangguh, serta memiliki komitmen terhadap kehidupan demokratis yang sehat dan berkeadaban.

Pembahasan

Konsep kesadaran kewarganegaraan dalam pendidikan dan demokrasi

Kesadaran kewarganegaraan merupakan bentuk kesadaran individu akan peran, hak, dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara. Kesadaran ini tercermin dalam sikap peduli, tanggap, dan bertanggung jawab terhadap dinamika kehidupan bernegara. Seorang warga negara yang memiliki kesadaran ini akan memahami bahwa hak-hak yang dimilikinya tidak terlepas dari kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial, menjunjung hukum, serta berkontribusi dalam kehidupan demokratis yang berkeadaban. Dalam ranah pendidikan formal, kesadaran kewarganegaraan ditanamkan melalui kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), yang dirancang untuk membentuk siswa menjadi individu yang berpikir kritis, berperilaku etis, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis mengenai konstitusi dan sistem pemerintahan, tetapi juga mendorong penghayatan nilai-nilai Pancasila serta pembentukan karakter warga negara yang unggul. Kesadaran ini mencakup tiga ranah utama: kognitif, yaitu pemahaman terhadap struktur dan prinsip dasar negara; afektif, yakni rasa empati dan kepedulian terhadap sesama serta kehidupan publik; serta psikomotorik, yang mengarah pada perilaku nyata seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menyampaikan aspirasi secara bijak, dan menegakkan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berpijak pada kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif warga negaranya. Partisipasi dalam pemilu hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik; yang tak kalah penting adalah keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta kontribusi dalam komunitas dan kegiatan sosial. Demokrasi menuntut kehadiran warga negara yang sadar akan suaranya, kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada

kepentingan rakyat, dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam konteks ini, kesadaran kewarganegaraan menjadi pilar utama dalam memperkuat praktik demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Tanpa kesadaran ini, partisipasi politik dapat bersifat pasif, bahkan rentan dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui pendidikan menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi yang tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Tantangan kesadaran kewarganegaraan di era digital

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kesadaran kewarganegaraan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Meskipun media digital menawarkan ruang partisipasi publik yang luas dan cepat, kenyataannya tidak semua warga negara mampu mengoptimalkan peluang ini secara kritis dan bertanggung jawab. Beberapa kendala utama yang muncul antara lain:

Disinformasi dan hoak

Melimpahnya informasi di dunia maya tidak selalu diiringi dengan kualitas dan akurasi yang memadai. Informasi palsu atau menyesatkan—baik yang sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu maupun yang tersebar karena kelalaian—dapat membentuk opini publik yang keliru. Disinformasi ini melemahkan pemahaman kolektif terhadap isu-isu penting dan menciptakan kebingungan dalam pengambilan sikap warga negara.

Polarisasi digital

Platform digital sering kali memperkuat bias kelompok dan menciptakan "ruang gema" (echo chambers), di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka. Akibatnya, masyarakat terpecah dalam kelompok-kelompok ekstrem yang saling bertentangan dan sulit berdialog secara sehat. Polarisasi semacam ini menggerus kohesi sosial dan menghambat terbentuknya kesepakatan dalam kehidupan demokratis.

Apatisme politik digital

Meski akses terhadap informasi politik kian terbuka, tidak semua pengguna internet memilih untuk terlibat aktif. Banyak individu hanya menjadi konsumen pasif, menyerap informasi tanpa melakukan refleksi kritis atau mengambil tindakan nyata. Kondisi ini menyebabkan partisipasi digital bersifat semu, karena tidak berkontribusi pada diskursus publik yang substansial maupun perubahan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Ketimpangan akses dan literasi teknologi

Masih terdapat kesenjangan signifikan dalam hal akses terhadap perangkat digital dan kemampuan untuk menggunakannya secara efektif. Warga dari kelompok tertentu—seperti masyarakat di daerah terpencil, lanjut usia, atau berpendidikan rendah—cenderung tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi. Akibatnya, terjadi eksklusi digital yang menghambat keterlibatan mereka dalam aktivitas kewarganegaraan modern. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan

sistematis dan kolaboratif, mulai dari peningkatan literasi digital, pendidikan kritis terhadap media, hingga penyediaan akses teknologi yang merata. Kesadaran kewarganegaraan di era digital hanya akan tumbuh subur jika didukung oleh lingkungan informasi yang sehat, dialog yang inklusif, dan pemahaman politik yang mendalam.

Strategi penguatan partisipasi demokratis di era digital

Untuk membangun budaya demokrasi yang kuat dan inklusif di era digital, diperlukan strategi yang terencana dan menyentuh berbagai aspek kehidupan warga negara. Partisipasi tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya ekosistem yang mendukung kesadaran, akses, dan keahlian dalam ruang digital. Berikut ini adalah beberapa pendekatan strategis yang bisa dilakukan untuk memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi berbasis teknologi:

Integrasi pendidikan digital ke dalam kurikulum ppkn

Salah satu langkah krusial adalah merevisi kurikulum pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (ppkn) agar mencakup materi terkait literasi digital dan etika bermedia. Siswa perlu dibekali dengan kemampuan memahami dinamika dunia maya, mengenali informasi yang menyesatkan, serta berinteraksi secara bijak dan bertanggung jawab di ruang digital. Dengan integrasi ini, peserta didik tidak hanya memahami konstitusi, tetapi juga belajar menerapkannya dalam konteks media sosial dan teknologi informasi.

Penguatan kampanye literasi digital

Pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, serta berbagai organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi dalam menyelenggarakan kampanye literasi digital secara masif dan berkelanjutan. Kegiatan seperti pelatihan, lokakarya, dan edukasi publik harus difokuskan pada upaya menangkal hoaks, meningkatkan kemampuan kritis warga dalam membaca informasi, serta mendorong pembentukan opini publik yang rasional dan berlandaskan data.

Pengembangan platform partisipatif

Untuk memperluas saluran keterlibatan masyarakat, penting dikembangkan berbagai platform digital yang mendukung partisipasi demokratis secara sehat. Media sosial yang moderat, forum diskusi aspiratif, serta inisiatif e-governance seperti portal pengaduan dan konsultasi publik, dapat menjadi jembatan yang mempertemukan warga dengan pembuat kebijakan. Melalui platform ini, suara masyarakat dapat lebih terdengar dan berkontribusi langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Pendidikan politik virtual yang inklusif dan menarik

Teknologi digital memberi peluang besar untuk menyampaikan pendidikan politik dalam format yang lebih menarik dan mudah diakses. Webinar, podcast, kanal youtube edukatif, hingga media sosial informatif dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan isu-isu kewarganegaraan, memperkenalkan proses legislasi, serta membangkitkan minat masyarakat—khususnya generasi muda—untuk aktif dalam kehidupan politik dan sosial.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Kesadaran kewarganegaraan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan demokratis yang sehat dan berkelanjutan, terlebih di tengah era digital yang terus bergerak dinamis. Era ini menghadirkan peluang yang besar bagi warga negara untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan luas dalam berbagai aspek kehidupan publik. Namun di sisi lain, era digital juga membawa serta tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti membanjirnya informasi yang tidak dapat diverifikasi, menurunnya partisipasi aktif warga, dan meningkatnya fragmentasi sosial akibat polarisasi opini di ruang maya. Dalam situasi ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut. Pendidikan harus diarahkan untuk menanamkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan semangat partisipasi aktif dan bertanggung jawab di ruang publik, baik secara langsung maupun virtual.

Ancaman seperti disinformasi, sikap apatis terhadap isu publik di ranah digital, serta menguatnya perpecahan sosial karena polarisasi ideologi dan informasi harus dijawab dengan langkah konkret. Oleh karena itu, penguatan kesadaran dan partisipasi warga di dunia digital tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan integrasi pendidikan berbasis teknologi, pengembangan platform digital partisipatif, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas sipil, dan media. Dengan begitu, cita-cita untuk membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan dapat tercapai secara lebih nyata dan berkelanjutan.

Saran

Untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi kewarganegaraan di era digital, perlu adanya langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam memperluas jangkauan program literasi digital, terutama ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh oleh perkembangan teknologi. Dengan memperhatikan kesetaraan akses, masyarakat di daerah terpencil juga bisa diberdayakan agar memiliki keterampilan dasar dalam mengenali informasi yang benar dan menghindari jebakan disinformasi. Lembaga-lembaga pendidikan juga memegang peranan penting dalam membentuk generasi yang melek digital dan sadar peran kewarganegaraannya. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan penggunaan media digital dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Praktik langsung seperti diskusi daring, pembuatan konten edukatif, serta simulasi partisipasi politik di ruang maya dapat menjadi media pembelajaran yang relevan dan menarik bagi peserta didik.

Di sisi lain, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok yang memiliki akses luas terhadap teknologi sekaligus wawasan kritis, diharapkan mampu tampil sebagai agen perubahan digital. Mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan konten digital yang mendidik, menggugah kesadaran publik, dan mendorong budaya berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi. Melalui peran ini, mahasiswa tidak hanya

menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan, masyarakat umum, dan ruang-ruang digital yang semakin mendominasi komunikasi sosial saat ini.

Daftar pustaka

- Agil nanggala, and karim suryadi. 2020. o jgc ix (2) jurnal global citizen analisis konsep kampus merdeka dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan', jurnal global citizen, 2, 2020, pp. 11–23
- Asdar, a, alfira yuniar, and dian alfiani. 2024. 'penguatan partisipasi cerdas masyarakat dalam menghadapi hoaks di era digital untuk pemilu 2024 yang berkualitas di desa lembang gantarangkeke', 3.2 , pp. 25–32
- Dalimunthe, amsal qori, and neng nurcahyati sinulingga. 2023. 'implementasi pendidikan islam era digital dalam membina akhlak mulia generasi islami', paedagoria :jurnal kajian, penelitian dan pengembangan kependidikan, 14.3, pp. 362–70 <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/paedagoria>>
- Fitriani, deti, yeni budiyan, adinda rahayu hardika, and mita choerunissa. 2023. 'partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di indonesia: analisis peran teknologi dan media sosial', advances in social humanities research, 1.4 pp. 362–71 <<https://adshr.org/index.php/vo/article/view/43>>
- G, muhammad tahir, m darwis nur tinri, and firdaus anas. 2025. 'ketimpangan sosial dan akses terhadap teknologi : dampaknya terhadap mobilitas sosial masyarakat di kota makassar', 4.2
- Haliim, wimmy. 2016. 'demokrasi deliberatif indonesia : konsep partisipasi masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif', jurnal masyarakat indonesia, 42.1, pp. 19–30, doi:10.14203/jmi.v42i1.556
- Hamson, zulkarnain. 2022. penghayatan nilai demokrasi pancasila melalui simulasi pembelajaran digital sebagai upaya pembentukan karakter mahasiswa,
- Hidayat, hanif nur, muhammad rafi cantas wicaksana, muhammad zakie irdana, and firdaus djohar. 2024. 'dakwah di era digital: tantangan dan peluang di dunia maya', informatics.uui, 5.1, p. 1 <<https://informatics.uui.ac.id/2024/05/02/dakwah-di-era-digital-tantangan-dan-peluang-di-dunia-maya/>>
- Kania, delila. 2023. and universitas pasundan, 'pembelajaran konsep kewarganegaraan menurut', june,
- Marshall, t.h. 1950. 'citizenship and social', the welfare state reader, pp. 30–39 <<http://books.google.co.il/books>>
- Maulani, giandari. 2024. pendidikan kewarganegaraan, ed. By muhammad kurnia rizal (pt sada kurnia pustaka)
- Nieto, sonia. 2009. multicultural education in the united states: historical realities, ongoing challenges, and transformative possibilities, the routledge international companion to multicultural education, doi:10.4324/9780203881514-16
- Nurlaili, lili, and sri utami, 2023. 'transformasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (ppkn) melalui integrasi teknologi', ghancaran: jurnal pendidikan bahasa dan sastra indonesia, november, pp. 241–48,

doi:10.19105/ghancaran.vi.11754

- Oikawa, entrevista erika. 2013. 'as competências necessárias para uma net smart – entrevista com howard rheingold', 18
- Pasal, sanksi pelanggaran, undang-undang nomor, hak cipta, undang-undang nomor, setiap orang, penggunaan secara komersial, and others, negara & konstitusi
- Pateman, carole. 2014. 'participation and democratic theory', participation and democratic theory, pp. 1–122, doi:10.1017/cbo9780511720444
- Pradana, yudha, '68 - 182', untirta civic education journal, 3.2 (2018), pp. 168–82
- Rangga saputra, arie, apreli puspita dewi, sahrial hari purnomo, siti nurwahyu, afika riska indarwatin, and imam m.m ghazal. 2024. 'pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara di era digital', 1.2, pp. 161–67
- Sarjito, aris. 2024. 'hoaks , disinformasi , dan ketahanan nasional : ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital indonesia', pp. 175–86
- Sinamo, devith rohjer, gresmawati martiana gultom, and raymond sinurat. 2025. 'media dan perubahan sosial studi kasus : tentang penggunaan media sosial dalam kampanye politik dan dampaknya terhadap partisipasi politik', 01.03, pp. 223–30
- Siregar, waliyul maulana, delvita ayu, indah permata, sari rambe, pardomuan tanjung, raisty khaitami. 2024. and others, 'membangun demokrasi indonesia yang berlandaskan pancasila di era digital building indonesian democracy based on pancasila in the', november, pp. 9073–80
- Syadila, ayu valysa, masayu syakira quinna, and shofwah hilyatul auliya. 2024. 'industri buzzer dan polarisasi politik di era digital : perspektif ekonomi politik media', 6.1, pp. 28–38
- Syahrul dkk, 2004. 'teknologi informasi dan pendidikan', al-manar (edisi 1), pp. 1–7
- Yuniarto, bambang. 2020. 'membangun kesadaran demokrasi melalui pendekatan kontekstual pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan', edueksos : jurnal pendidikan sosial & ekonomi, 9.1, pp. 56–72, doi:10.24235/edueksos.v9i1.6388
- Yuniarto, bambang, and rivo panji yudha. 2021. 'literasi digital sebagai penguatan pendidikan karakter menuju era society 5.0', edueksos : jurnal pendidikan sosial & ekonomi, 10.2, pp. 176–94, doi:10.24235/edueksos.v10i2.8096
- Züger, theresa. 2023. and hadi asghari, 'ai for the public. How public interest theory shifts the discourse on ai', ai and society, 38.2, pp. 815–28, doi:10.1007/s00146-022-01480-5